



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKANBARU

Gilberto Alexandro Silalahi, Zulkarnaini

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap khususnya pada aset tanah dan kendaraan dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya dengan menggunakan kerangka teori akuntabilitas publik Mark Bovens yang terdiri dari Dimensi Informasi, Penjelasan/Pembenaran, dan Konsekuensi. Melalui metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset sudah optimal namun pada dimensi informasi, pelaporan vertikal ke pengawas tercapai namun transparansi horizontal ke publik gagal; pada dimensi penjelasan, penyelamatan aset fisik dilakukan secara rasional namun terhambat oleh budaya birokrasi defensif; sedangkan pada dimensi konsekuensi sama sekali belum tercapai akibat ketiadaan instrumen sanksi dan reward/punishment internal. Faktor penghambat utama mencakup fragmentasi wewenang yang memicu praktik lempar tanggung jawab (*shifting the blame*), rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM), buruknya manajemen kearsipan masa lalu, serta patologi kultur birokrasi yang tertutup terhadap transparansi publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Aset Tetap, Good Governance, BPKAD.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan saat ini menempatkan akuntabilitas sebagai pilar penting dalam mewujudkan *Good*

Governance (Sistem Pemerintahan yang Baik). Terwujudnya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan

*Correspondence Address : gilberto.alexandro3753@student.unri.ac.id

DOI : 10.31604/jips.v13i7.2026. 2025-2030

© 2026UM-Tapsel Press

penyakit bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya ekonominya secara mandiri. Salah satu aspek krusial dari pengelolaan sumber daya ini adalah pengelolaan aset tetap daerah atau Barang Milik Daerah (BMD). Aset tetap seperti tanah, peralatan, mesin, gedung, dan infrastruktur merepresentasikan akumulasi investasi publik dalam jumlah yang sangat signifikan di neraca pemerintah. Pengelolaan aset yang ideal akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik (*public trust*), sebaliknya pengelolaan yang buruk tidak hanya menimbulkan kerugian finansial negara, tetapi juga membuka peluang penyalahgunaan dan merusak reputasi pemerintah.

Sejak tahun 2019, Pemerintah Kota Pekanbaru menghadapi rentetan persoalan serius terkait legalitas aset tanah dan bangunan. Banyak aset yang tercatat sebagai milik pemerintah namun tidak memiliki kepastian hukum, sertifikat, maupun Berita Acara Serah Terima (BAST) yang valid, sehingga rawan sengketa atau dialihfungsikan tanpa izin. Upaya digitalisasi melalui aplikasi *Smart Petaku* belum sepenuhnya efektif karena ratusan aset tersebut belum diverifikasi secara fisik di lapangan. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks pada aset bergerak, di mana ditemukan 725 unit kendaraan dinas yang tidak memiliki bukti kepemilikan lengkap (tanpa BPKB dan STNK). Puncaknya pada tahun 2025, tercatat sekitar 200 unit mobil dinas belum dikembalikan oleh para mantan pejabat. Fenomena ini merupakan indikasi kuat lemahnya mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pemberian sanksi dalam sistem birokrasi pengelola aset.

Lemahnya akuntabilitas ini juga terekam secara statistik dalam penilaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru periode 2023–2024. Meskipun nilai

"Perencanaan Kinerja" mengalami kenaikan, indikator "Pelaporan Kinerja" justru menunjukkan nilai yang relatif rendah dan menurun dari angka 10,5 menjadi 10,2. Hal yang sama terjadi pada indikator "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal" yang menurun dari 17,75 menjadi 16,5. Penurunan pada dua indikator krusial ini menegaskan adanya celah kegagalan yang signifikan pada tahapan penatausahaan, pengawasan fisik aset, dan pelaporan kondisi aset secara berkelanjutan.

Untuk mengevaluasi krisis tata kelola aset ini, teori akuntabilitas publik dari Mark Bovens (2007) digunakan sebagai pisau analisis utama. Bovens membedah akuntabilitas bukan sekadar sebagai rutinitas pelaporan administratif, melainkan sebagai sebuah relasi dinamis antara aktor dan publik melalui tiga dimensi: Informasi (*Information*), Penjelasan/Pembenaran (*Justification*), dan Konsekuensi (*Consequences*). Berbeda dengan kajian terdahulu yang mayoritas berfokus pada analisis kuantitatif kinerja, penelitian ini berupaya mengisi celah (*research gap*) dengan menguraikan secara kualitatif tumpahnya pengendalian internal yang memicu hilangnya aset tetap daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan aset tetap (dibatasi pada aset tanah dan kendaraan dinas) di BPKAD Kota Pekanbaru, serta menguraikan faktor-faktor apa saja yang menghambat terwujudnya tata kelola aset yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif (*descriptive case study*) yang

memusatkan perhatian secara intensif dan mendalam pada satu sistem yang terikat (*bounded system*), yaitu operasional tata kelola dan akuntabilitas aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih karena mampu menyajikan gambaran mendalam mengenai kondisi empiris di lapangan untuk memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, tanpa berfokus pada pengujian hipotesis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena peran strategis dan sentral BPKAD sebagai badan teknis utama yang bertanggung jawab terhadap seluruh siklus pengelolaan aset daerah, mulai dari tahapan perencanaan, pengadaan, penggunaan, hingga pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah pejabat/birokrat yang berperan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

4. Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dari pihak-pihak yang dipilih secara *purposive sampling*, yakni pejabat struktural BPKAD Kota Pekanbaru seperti Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Inventarisasi serta Penatausahaan, dan staf teknis operator SIMDA Barang Milik Daerah (BMD).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari dokumen-dokumen administratif dan arsip publik di lingkungan BPKAD Kota Pekanbaru, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan ringkasan Laporan Keuangan Daerah. Sumber sekunder juga mencakup landasan normatif perundang-undangan

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap aktivitas operasional di lingkungan BPKAD Kota Pekanbaru. Pengamatan ini difokuskan untuk melihat bagaimana sistem administrasi pengelolaan aset tetap dijalankan di dunia nyata, termasuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA BMD), serta interaksi antar pegawai dalam melaksanakan tata kelola.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data ini menggunakan wawancara mendalam secara langsung yang bersifat semi-terstruktur menggunakan pedoman yang fleksibel. Wawancara bertujuan untuk menggali secara mendalam berbagai aspek terkait mekanisme pertanggungjawaban aset tetap, kendala dalam pencatatan dan pelaporan, serta pelaksanaan pengawasan internal di instansi.

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendukung serta memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Dokumen yang dikumpulkan meliputi laporan inventarisasi aset, laporan keuangan, LKjIP, arsip internal pengadaan aset BPKAD, serta dokumen regulasi sebagai dasar normatif penilaian akuntabilitas.

6. Teknik Analisis Data

a) Kondensasi Data

Tahapan ini merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus masalah lalu mereduksinya ke dalam tema-tema utama yang berkaitan dengan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan proses.

b) Penyajian Data

Data yang telah dikondensasi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur agar mudah dianalisis. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan kutipan pernyataan informan yang dikaitkan dengan hasil observasi serta dokumen resmi (seperti LHP BPK) guna melihat pola dan hubungan antar-tema.

c) Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap interpretasi untuk menarik makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan sementara yang diperoleh akan terus diverifikasi sepanjang penelitian dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan dan dokumen pendukung guna memastikan keabsahan temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwujudan nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dievaluasi menggunakan teori Akuntabilitas Publik dari Mark Bovens. Akuntabilitas publik dievaluasi bukan sekadar sebagai rutinitas pelaporan administratif yang bersifat hierarkis, melainkan sebagai sebuah relasi interaktif antara aktor (birokrasi) dengan forum (publik/lembaga pengawas) melalui tiga dimensi utama.

1. Dimensi Informasi

Dimensi ini menguji sejauh mana ketersediaan, akurasi, dan aksesibilitas data aset yang disajikan oleh pemerintah. BPKAD Kota Pekanbaru telah melakukan digitalisasi pencatatan aset melalui tiga platform utama: SIMDA BMD / SIMADANI untuk mencatat nilai finansial dan penyusutan, Smart Petaku (dikelola Dinas Pertanahan) untuk pemetaan lahan fisik, dan Portal Laksamana untuk pengarsipan dokumen digital.

Pada aspek akuntabilitas vertikal, BPKAD menunjukkan kepatuhan yang baik dengan secara berkala melaporkan pembaruan data dan aset bermasalah kepada lembaga pengawas seperti Inspektorat, BPK, dan KPK. Namun, kegagalan terjadi pada akuntabilitas horizontal (pemenuhan hak transparansi publik). Situs web resmi BPKAD sangat minim infografis sehingga sulit dipahami oleh masyarakat awam, dan permohonan informasi publik dibatasi dengan keharusan melalui satu pintu di Dinas Kominfo. Selain itu, terdapat titik buta (*blind spot*) dalam manajemen kearsipan masa lalu, di mana hilangnya dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) lama membuat validitas nilai aset rentan digugat. Fragmentasi kewenangan aplikasi antara BPKAD dan Dinas Pertanahan juga menciptakan sistem yang terkotak-kotak (*silo system*), memperlambat sinkronisasi data fisik dan finansial.

2. Dimensi Justifikasi

Dimensi justifikasi di BPKAD Kota Pekanbaru dieksekusi secara dualistik. Di satu sisi, birokrasi mampu menunjukkan justifikasi berbasis tindakan nyata (*actionable justification*) ketika merespons temuan hilangnya 200 unit kendaraan dinas, yakni dengan melakukan razia penarikan massal dan pendataan ulang dari mantan pejabat.

Di sisi lain, BPKAD kerap menggunakan justifikasi defensif saat menghadapi krisis aset. BPKAD melakukan praktik *shifting the blame*

(lempar tanggung jawab) dengan berdalih bahwa pengamanan fisik aset murni kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis selaku Pengguna Barang. Patologi birokrasi defensif ini semakin nyata ketika BPKAD sengaja menahan publikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dari publik dengan dalih "menjaga rahasia dan nama baik institusi". Praktik ini jelas mencederai pilar transparansi *Good Governance*.

3. Dimensi Konsekuensi

Dimensi ini tervalidasi sebagai titik terlemah dalam tata kelola aset Pemkot Pekanbaru. Mekanisme *reward and punishment* internal sama sekali tidak tersedia bagi dinas yang lalai menyeter laporan data inventarisasi. BPKAD diposisikan hanya sebagai entitas administratif pencatat (klerikal) yang tidak memiliki instrumen pemaksa, seperti kewenangan menunda pencairan anggaran bagi OPD yang membangkang.

Bahkan, otoritas untuk menjatuhkan sanksi atau menggelar sidang Majelis Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atas aset yang hilang murni dimonopoli oleh Inspektorat. Akibat ketiadaan daya paksa mandiri ini, kepatuhan administratif dari OPD hanya bersifat sukarela, dan BPKAD baru bergerak merespons secara serius ketika ada teguran dari lembaga eksternal independen, seperti Komisi Informasi.

Faktor Penghambat

1. Lemahnya Kompetensi dan Literasi SDM

Rendahnya pemahaman akuntansi pada staf operator di lapangan menyebabkan tingginya angka *error administratif*. Kesalahan input data ini secara langsung menghambat siklus pembukuan aset dan menghalangi penerbitan neraca keuangan yang wajar dan tepat waktu.

2. Buruknya Manajemen Kearsipan dan Pengamanan Dokumen di Tingkat OPD

Kehilangan dokumen legalitas krusial (seperti BPKB, STNK, dan BAST) sering terjadi di tingkat dinas akibat kelalaian non-teknis, seperti proses pindah gedung kantor atau peminjaman. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan yang rapuh ini memutus riwayat legalitas aset, sehingga data BPKAD menjadi lemah saat proses audit.

3. Keterbatasan Personel Khusus Pengelola Informasi Publik

Tidak adanya sumber daya manusia atau staf khusus di bidang kehumasan dan TI membuat pengelolaan transparansi informasi publik terhambat. Pengelolaan website BPKAD hanya dijadikan "pekerjaan sambilan", yang berakibat pada minimnya pembaruan data visual (infografis), sehingga menyulitkan masyarakat untuk ikut serta mengawasi kekayaan daerah secara partisipatif.

SIMPULAN

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Aset Tetap di BPKAD Kota Pekanbaru berdasarkan kerangka teori Mark Bovens berjalan secara dualistik dan belum optimal. Pada Dimensi Informasi, pelaporan vertikal kepada lembaga pengawas telah berjalan baik melalui inovasi digital aplikasi SIMADANI dan portal arsip Laksamana, namun transparansi horizontal kepada masyarakat masih gagal akibat minimnya sajian infografis dan berbelitnya proses informasi publik. Pada Dimensi Penjelasan, upaya penyelamatan aset fisik seperti penarikan massal kendaraan dinas telah dieksekusi secara rasional, tetapi terhambat oleh budaya birokrasi defensif yang sengaja menahan publikasi dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Sementara itu, Dimensi

Konsekuensi menjadi titik terlemah yang melumpuhkan tata kelola akibat ketiadaan kewenangan BPKAD dalam menjatuhkan sanksi (*reward and punishment*) terhadap dinas yang indiscipliner, mengingat wewenang penindakan murni dimonopoli oleh Inspektorat. Kegagalan pemenuhan akuntabilitas ini berakar pada tiga faktor penghambat utama, yakni rendahnya kompetensi dan literasi akuntansi Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pelaksana teknis, buruknya manajemen kearsipan dan pengamanan dokumen historis (seperti BPKB dan BAST lama) di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta ketiadaan personel khusus yang didedikasikan untuk mengelola keterbukaan informasi secara visual bagi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Syam Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep Dan Aplikasi, edisi 1*
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. *European Law Journal*, 13(4)
- Creswell, J. W., & Crewell, J. D. (2021). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. In *Introducing English Language*.
- Hasanah, N. (2020). *Evaluasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) barang milik daerah dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan* [Skripsi, Universitas Brawijaya]. Repository Universitas Brawijaya
- Mardiasmo. (2021). Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah. In *Otonomi and Manajemen Keuangan Daerah*.
- Panggabean, S., & Simanjuntak, A. (2021). Analisis akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah pada badan pengelola keuangan dan aset daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 3(2), 45–58
- Saputra, M. I. (2020). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pelaporan barang milik daerah pada pemerintah daerah* [Skripsi, Universitas Andalas]. Scholar Unand
- Setiawan, A. (2023). *Implementasi Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia*. 2(10), 2153–2163
- Sri Rachmawati Rachman, Nofal Supriaddin, P. M. D. (2025). *Analisis Inventarisasi Barang Milik Daerah Atas Tanah dalam Mewujudkan Tata Kelola Aset Daerah yang Baik (Studi Kasus Pemerintah Kota Kendari)*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, H., & Yuliani, F. (2021). Hambatan birokrasi dalam implementasi good governance pada penatausahaan aset tetap daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(3), 310–325.
- Yustiana, H., Arifuddin, & Kartini. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Bmn). *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 646–654